

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN TANJUNG ENIM
KOTA WISATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

A L D A P R A T I W I

NIM. 07011182025042

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
Juli 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN TANJUNG ENIM MENUJU
KOTA WISATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**


Oleh:

**ALDA PRATIWI
NIM. 07011182025042**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 22 Juni 2024

Pembimbing

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



**Dr. M Nur-Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
TANJUNG ENIM MENUJU KOTA WISATA**

SKRIPSI

Oleh :

ALDA PRATIWI
07011182025042

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 22 Juli 2024**

Pembimbing :

Sofyan Effendi S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



Penguji :

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 1962112251989121001



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Mengetahui,



Dekan FISIP UNSRI,
Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,**
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Alda Pratiwi
NIM : 07011182025042
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Tanjung Enim Menuju Kota Wisata" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 25 Juni 2024




Alda Pratiwi
07011182025042

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Restu Dan Doa Bapak Ibu Adalah Ridho Yang Maha Kuasa Untuk Langkahku”

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Q.S YASIIN : 82

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kedua Orang Tua Saya, Bapak Dan Ibu Tercinta
2. Adik Saya
3. Seluruh Dosen Yang Saya Hormati Yang Telah Membimbing Saya
4. Teman Seperjuangan
5. Almamater Kehormatan Saya

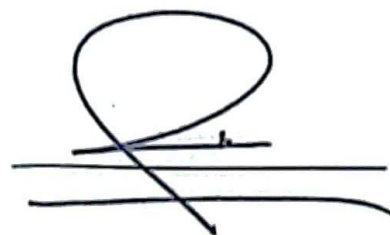
ABSTRACT

This research aims to determine the Collaborative Governance process in managing Tanjung Enim towards a tourist city. A qualitative descriptive method using the Collaborative Governance theory approach according to Ansell and Gash (2007) was used as an analytical study in this research. The data collection techniques are through interviews, documentation and observation. The results of the research show that the management of Tanjung Enim Towards a Tourist City is quite good, marked by several indicators that have been implemented very well, but it is still in progress and not yet fully optimal. This is indicated by its human resources which are still not said to be optimal because many people who do not understand and cannot protect the environment. In terms of joint commitment, government involvement is still not optimal, this can be seen from the low level of joint commitment carried out by the government and participation, causing obstacles to effective and efficient collaboration processes in the implementation of collaborative governance. lack of government initiative in monitoring and following up on what is happening in the field. Meanwhile, in implementing collaborative governance, effective communication is needed to make it easier for actors to collaborate so that they can optimize their role in developing Tanjung Enim as a tourist city.

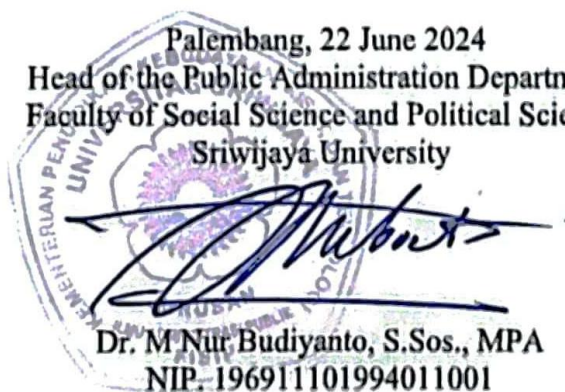
Keywords: *Collaborative Governance, Management, Tourism City*

Advisor

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



Palembang, 22 June 2024
Head of the Public Administration Department
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Tanjung Enim Menuju Kota Wisata. Metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash (2007) digunakan sebagai kajian analisis dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Tanjung Enim Menuju Kota Wisata cukup baik ditandai dengan beberapa indikator yang sudah dijalankan dengan sangat baik, namun masih dalam proses dan belum sepenuhnya optimal, hal ini ditandai dengan sumber daya manusia yang masih belum dikatakan maksimal karena ditemukan banyak masyarakat yang belum paham dan tidak dapat menjaga lingkungan. Dalam komitmen bersama keterlibatan pemerintah masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya komitmen bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan partisipasi menyebabkan terhambatnya proses kolaborasi yang efektif dan efisien dari berjalannya *collaborative governance*. kurangnya insiasi pemerintah dalam mengawasi dan menindak lanjuti apa yang terjadi dilapangan. Adapun dalam pelaksanaan *collaborative governance* tersebut, dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan para aktor melakukan kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan Tanjung Enim Kota Wisata.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan, Kota Wisata

Pembimbing

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



Palembang, 22 Juni 2024
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan sebagaimana mestinya guna memenuhi persyaratan kelulusan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penulisan Skripsi ini berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Tanjung Enim Kota Wisata”. Selama penulisan skripsi, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan do’a, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan koreksi yang sifatnya konstruktif untuk mendekati sebuah kesempurnaan, pada kesempatan ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda serta Adik, serta keluarga yang telah memberikan dukungannya baik berupa materil maupun spritual sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. M. Alfitri, M.Si. Selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan terkait proses penyusunan Skripsi.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Periode 2022-2025.
6. Vivi Rosi Afrida Sucitasari, Acry Larasandi, Tiara Revalia Az- Zahra selaku teman seperjuangan yang selalu mendukung dan menemani penulis.
7. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu ikut serta membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama Penelitian hingga penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan maupun keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila ada isi dari

skripsi ini yang kurang berkenan atau apabila terdapat kesalahan. Dengan segenap kerendahan hati penulis juga mengharapkan saran, arahan maupun kritikan demi penyempurnaan hasil skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, bagi pengembangan diri penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, dan semoga bantuan yang diberikan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian <i>Governance</i>	10
2.2 Definisi <i>Colaborative Governance</i>	12
2.3 Ukuran Keberhasilan <i>Collabortive Governance</i>	15
2.4 Hambatan dalam <i>Collaborative Governance</i>	30
2.5 Konsep <i>Urban Tourism</i>	32
2.6 Komponen Konsep <i>Urban Tourism</i>	33
2.7 Definisi Pengembangan Pariwisata	34
2.8 Strategi Pengembangan Pariwisata	35
2.9 Kebijakan Pengembangan Pariwisata	36
2.10 Penelitian Terdahulu.....	37
2.11 Kerangka Berpikir	41
BAB III METODELOGI PENELITIAN	42

3.1	Jenis Penelitian	42
3.2	Definisi Konsep	42
3.3	Fokus Penelitian	44
3.4	Jenis dan Sumber Data	45
3.5	Informan Penelitian	45
3.6	Teknik Pengumpulan Data	46
3.7	Metode Analisis Data	47
3.8	Sistematika Penulisan	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		50
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.1	Gambaran Umum Tanjung Enim	50
4.1.2	Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	56
4.1.3	Gambaran umum PT Bukit Asam (Tim Kota Wisata)	66
4.2	Informan Penelitian	72
4.3	Hasil Penelitian	72
4.3.1	<i>Starting conditional</i> /Kondisi awal	80
4.3.2	Proses kolaborasi	85
4.3.3	Desain insitutional	94
4.3.4	<i>Facilitative Leadership</i> /Kepemimpinan fasilitatif	101
4.4	Pembahasan	105
BAB V PENUTUP		114
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA		116

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Delineasi Wilayah RDTR WP Perkotaan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim , Tahun 2022	3
Tabel 2 Jumlah Sarana Akomodasi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Akomodasi di Kecamatan Lawang Kidul, 2021	5
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4 Fokus Penelitian	42
Tabel 5 Deskripsi Informan Penelitian	70
Tabel 6 Daftar Pengunjung Museum Batubara 2023	73
Tabel 7 Matriks Hasil Penelitian	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	39
Gambar 1 Peta Tanjung Enim	50
Gambar 2 Gapura Selamat Datang Tanjung Enim.....	55
Gambar 3 Struktur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim	57
Gambar 4 Museum Batubara Tanjung Enim	73
Gambar 5 Plaza Saringan Malam Hari.....	75
Gambar 6 Klawas Waterpark	76
Gambar 7 Hotel Saka Tanjung Enim	78
Gambar 8 Batik Kujur Khas Tanjung Enim.....	79
Gambar 9 Dokumentasi Penandatanganan Prasasti Pencanangan Tanjung Enim Menuju Kota Wisata	85
Gambar 10 Pendestrian Pasar Bawah	90
Gambar 11 dokumentasi Seminar & FGD Tanjung enim menuju kota wisata.....	92
Gambar 12 Monpera Tanjung Enim	94
Gambar 13 Workshop Seni Reog Dan Pegon Menuju Tanjung Enim Kota Wisata..	96
Gambar 14 Seminar Implementasi Tanjung Enim Menuju Kota Tujuan Wisata	98
Gambar 15 Peraturan, Surat Keputusan & PERDA.....	100
Gambar 16 Kerusakan sarana.....	100
Gambar 17 Kerjasama Dengan Serikat Pegawai Dalam Pembersihan Plaza Saringan	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Konfirmasi

Lampiran 6 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 7 Kartu Studi Mahasiswa

Lampiran 8 Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 9 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi

Lampiran 10 Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 11 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 12 Lembar Data Mahasiswa Forlap Dikti

Lampiran 13 Formulir Pendaftaran Ujian Skripsi

Lampiran 14 Lembar Pernyataan Orisinalitas

Lampiran 15 Lembar Perbaikan Komprehensif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata saat ini menjadi penggerak utama pembangunan, dengan fokus pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan mengacu pada fokus yang disengaja pada kepentingan wisatawan dan partisipasi aktif masyarakat lokal, sekaligus memastikan stabilitas lingkungan jangka panjang melalui pengelolaan pariwisata yang efektif. Tujuannya adalah untuk mengatasi pertimbangan ekonomi, sosial, dan estetika sekaligus menjaga integritas ekologi, keanekaragaman hayati, budaya, dan sistem kehidupan. Selain itu, perluasan sektor pariwisata dimanfaatkan untuk mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk membina kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor korporasi untuk mengelola pariwisata secara efektif. Pengembangan wisata yang efektif ditandai dengan keterlibatan masyarakat yang aktif, karena dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat lokal.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 memberikan pedoman pembangunan berkelanjutan dan penatausahaan tempat wisata di Indonesia, dengan fokus pada promosi pariwisata ramah lingkungan. Partisipasi beberapa pemangku kepentingan dan identifikasi kawasan untuk pengembangan wisata dapat ditingkatkan dengan pengumpulan sumber daya dan upaya kolaboratif yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang efektif melibatkan pelestarian kearifan lokal namun tetap kompetitif.

Industri pariwisata memegang peranan penting dalam kemajuan perekonomian suatu daerah. Pada tahun 2022, pariwisata diproyeksikan menjadi sumber pendapatan asing terbesar kedua bagi Indonesia. Indonesia kini melakukan upaya signifikan untuk mendongkrak sektor pariwisatanya dan berhasil meraih peringkat ke-32 dunia. Kabupaten Muara Enim memiliki potensi yang belum tergali dalam beberapa bentuk pariwisata, termasuk wisata alam, satwa, dan budaya, yang perlu dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi perekonomian pariwisata yang berkembang. Pada tahun 2022, Dinas Pariwisata menargetkan terdapat kurang lebih 94 tempat wisata ternama di Muara Enim.

Oleh karena itu, PT Bukit Asam memilih fokus mengembangkan sektor pariwisata di Tanjung Enim sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kota (WP) Tanjung Enim Tahun 2022-2042, sebagai bagian dari upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di kawasan kritis perkotaan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul.

RDTR WP Perkotaan Tanjung Enim mewujudkan prinsip '*Eco-Sustainable, Connected, Diverse, dan Inclusive*'. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kota wisata pertambangan yang hidup berdampingan secara harmonis dengan alam, difasilitasi oleh infrastruktur yang berkembang dengan baik, merangkul keragaman, dan memberikan kemudahan akses dan peluang investasi. Yang dimaksud dengan kawasan RDTR WP Perkotaan Tanjung Enim adalah 7,4% dari total luas wilayah Kecamatan Lawang Kidul atau setara dengan 1.884,31 hektare. Area ini mencakup wilayah berikut:

Tabel 1 Luas Delineasi Wilayah RDTR WP Perkotaan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim , Tahun 2022

No	Wilayah	Luas Wilayah
1	Kelurahan Pasar Tanjung Enim	180,05 hektar
2	Kelurahan Tanjung Enim	455,83 hektar
3	Kelurahan Tanjung Enim Selatan	187,74 hektar
4	Desa Lingga	349,95 hektar
5	Desa Tegal Rejo	260,78 hektar
6	Desa Keban Agung	426. 11 hektar
7	Desa Darmo	23,86 hektar

Sumber: Website Bappeda Kabupaten Muara Enim, media RDTR perkotaan Tanjung Enim.

Program Tanjung Enim Kota Wisata merupakan contoh dedikasi PT Bukit Asam terhadap misi keberlanjutannya, khususnya dalam pengelolaan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memajukan kualitas hidup individu di industri pariwisata. Kota wisata berfungsi sebagai sarana untuk mencapai pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan pengembangan kota wisata adalah untuk mendorong pemerataan sejalan dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Sejak tahun 2016, PT Bukit Asam bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menginisiasi Program Kota Wisata Tanjung Enim. Tujuannya agar Tanjung Enim, daerah yang terkenal dengan pertambangan batu bara, dapat mencapai swasembada dan berkembang menjadi tujuan wisata di masa depan. PT Bukit Asam telah memulai pembangunan beragam fasilitas dan infrastruktur untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata di Tanjung Enim. Di antaranya Museum Batubara, Pusat Kuliner, Taman Sriwijaya, *Mini Zoo & Jogging Track*, Klawas *Waterpark* dan Plaza Saringan. Kawasan bekas pertambangan akan dialihfungsikan menjadi lokasi wisata ekologi, seperti *Botanical Garden*, danau buatan, *Orchard park* (Taman Buah), Taman RTH Berangau, *Agroforestri*, dan lokasi serupa lainnya.

Selain itu, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan dan promosi budaya lokal. Identitas budaya lokal ditingkatkan agar lebih menarik bagi wisatawan, antara lain promosi Batik Kujur, Songket, kesenian gitar solo, Tari Sambut, pencak silat Kuntau, dan kuliner khas Tanjung Enim. Promosi pariwisata dilakukan melalui berbagai acara dan pameran. Seperti pemilihan Bujang Gadis Serasan menampilkan kearifan asli Muara Enim. Selain itu, seminar, diskusi, dan festival kuliner diselenggarakan dengan tujuan untuk mempromosikan dan menjaga budaya lokal. PT Bukit Asam akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi masyarakat lokal, sehingga mereka berpartisipasi secara efektif dalam industri pariwisata baik dari sudut pandang budaya maupun kewirausahaan.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim sangat mendukung inisiatif transformasi Tanjung Enim menjadi destinasi wisata unggulan yang dipelopori oleh PT Bukit Asam. Tanjung Enim sedang dipertimbangkan sebagai destinasi wisata potensial di Kabupaten Muara Enim. Pengembangan Kota Wisata Tanjung Enim diyakini akan memberikan dampak positif bagi daerah. Termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pendirian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar tempat wisata. Selain itu, pendapatan Kabupaten Muara Enim diharapkan meningkat seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan.

Namun terkait dengan keadaan Tanjung Enim yang kini ditetapkan sebagai kota wisata, masih terdapat permasalahan lingkungan dalam pengelolaan pariwisatanya. Warga, khususnya di kawasan Tanjung Enim, sangat prihatin dengan banyaknya debu batu bara yang mereka alami sehari-hari. Selain itu, polusi yang diakibatkan oleh debu batu bara dan kemacetan lalu lintas akibat aktivitas truk juga menimbulkan ancaman serius. Kehadiran lalu lintas secara signifikan mempengaruhi

baik warga maupun pengguna jalan. Selain itu, Tanjung Enim saat ini belum mempunyai tempat pembuangan sampah permanen (TPA). Mengingat volume sampah yang dihasilkan, Tanjung Enim perlu membangun TPA sendiri agar dapat mengelola sampah dari kecamatan terdekat secara efektif. Hal ini sangat penting karena Tanjung Enim merupakan tujuan wisata populer, dan sangat penting bagi kota untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, serta menyediakan berbagai tempat wisata ikonik.

Konsentrasi debu batu bara yang sehari-hari ditemui masyarakat setempat, khususnya di wilayah Tanjung Enim, sangat memprihatinkan dan berpotensi memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya, ruas jalan tersebut menjadi tidak layak untuk angkutan truk karena sempitnya jalan di sekitar Tanjung Enim sehingga tidak mampu menampung arus lalu lintas yang cukup besar. Selain risiko pencemaran debu batu bara dan terjadinya kemacetan lalu lintas akibat lalu lintas truk, juga berdampak signifikan baik bagi warga maupun pengguna jalan.

Selain itu, data yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Lawang Kidul kekurangan jumlah hotel atau akomodasi yang memadai untuk memfasilitasi pengembangan Tanjung Enim sebagai destinasi wisata.

Tabel 2 Jumlah Sarana Akomodasi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Akomodasi di Kecamatan Lawang Kidul, 2021

No	Desa/Kelurahan	Hotel	Penginapan
1	Kelurahan Pasar Tanjung Enim	0	1
2	Kelurahan Tanjung Enim	0	0
3	Kelurahan Tanjung Enim Selatan	0	1
4	Desa Tegal Rejo	0	0
5	Desa Lingga	1	1
6	Desa Keban Agung	0	0
7	Desa Darmo	0	0
Total		1	3

Sumber: Kecamatan Lawang Kidul dalam angka 2023 (BPS Kabupaten Muara Enim)

Tanjung Enim terutama berfungsi sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi operasi pertambangan, dan sebagian besar kawasan tersebut digunakan untuk pemukiman. Pusat perekonomian utama terletak di sepanjang jalan lintas Batu Raja Muara Enim, yang membentang di sepanjang Sungai Enim dan dikelilingi oleh lahan yang didedikasikan untuk eksplorasi pertambangan batubara. Kawasan ini merupakan representasi nyata dari arus lalu lintas yang konstan di jalan utama, yang ramai dengan kendaraan angkutan logistik antarprovinsi dan skala besar sepanjang hari.

Motivasi pilihan individu untuk melakukan kunjungan wisata muncul dari kecenderungan bawaan mereka untuk mengapresiasi pemandangan alam yang terdapat di daerah tujuan wisata. Oleh sebab itu, sangat esensial bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk secara efektif mengawal dan memajukan bidang pariwisata.

Pengelolaan Tanjung Enim sebagai kota wisata yang efektif memerlukan kerja sama dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan promosi Tanjung Enim sebagai destinasi wisata. Kolaborasi aktif antar pemangku kepentingan sangat penting untuk mengatasi secara efektif beragam tantangan yang dihadapi dalam mengelola destinasi pariwisata Tanjung Enim. Berbagai lembaga harus mempunyai tujuan yang sama. Pengelolaan Kota Wisata Tanjung Enim menunjukkan koordinasi yang jelas antar pemangku kepentingan utama, terutama pemerintah, sektor komersial, dan masyarakat. Peran pemerintah di Kota Wisata Tanjung Enim adalah berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan dunia usaha berperan sebagai mitra dalam pengelolaan kota. Masyarakat memainkan peran penting baik sebagai peserta maupun penerima manfaat.

Konsep *Collaborative Governance* dipandang sebagai pendekatan yang layak untuk mempercepat dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata. *Collaborative Governance* (Tata Kelola Kolaboratif) adalah pendekatan baru yang digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sulit di masyarakat. Hal ini ditandai dengan premis mendasar untuk membangun hubungan yang adil antar pemangku kepentingan dari sektor publik, korporasi, dan komunitas. Metode ini juga melibatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan atau berupaya mencapai tujuan bersama.

Perspektif *Collaborative Governance* umumnya digunakan untuk mengatasi permasalahan daerah karena kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya secara efektif. Tata kelola kolaboratif adalah tahap yang mengikut sertakan berbagai aktor kebijakan untuk mencapai tata kelola yang baik. *Collaborative Governance* mengacu pada proses di mana banyak pihak bekerja sama untuk mengatasi tantangan atau kesulitan tertentu. Pihak-pihak tersebut tidak hanya mencakup lembaga pemerintah atau non-pemerintah, namun juga melibatkan masyarakat sipil dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, sebagai bagian dari gagasan tata kelola pemerintahan yang baik. Kolaborasi dilancarkan dengan memanfaatkan keterbatasan kemampuan, sumber daya, dan jaringan masing-masing pihak. Hal ini memungkinkan kolaborasi untuk menyatukan dan meningkatkan beragam komponen yang mendorong pencapaian tujuan bersama secara efektif.

Kebijakan pariwisata merupakan entitas multifaset yang sangat dipengaruhi oleh variabel ekonomi dan kebijakan politik. Faktor-faktor ini pada gilirannya dibentuk oleh lanskap geografis dan permintaan manusia terhadap aktivitas rekreasi

di lokasi tertentu. Perwujudan kota wisata melibatkan integrasi yang rumit dari beberapa elemen, seperti daya tarik wisata, fasilitas umum, dan fasilitas wisata yang dapat diakses. Komponen-komponen tersebut kemudian dipadukan dalam jalinan kehidupan masyarakat, selaras dengan tata cara dan adat istiadat yang ada. Menanggapi tantangan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengetahui proses implementasi *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Tanjung Enim sebagai kota wisata.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian, bisa dikenali permasalahan yang ada yaitu: Bagaimana *Collaborative Governance* atau tata kelola Pemerintah, Sektor swasta yaitu PT. Bukit Asam maupun yang lain, serta masyarakat dalam pengelolaan Tanjung Enim Kota Wisata?

1.3 Tujuan

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: mengubah masalah yang telah diusulkan.

- 1) Untuk memahami bagaimana komunitas dapat bekerja sama dalam mengelola program Tanjung Enim Kota Wisata
- 2) Untuk mencari tahu elemen-elemen yang mendorong dan menghalangi Kerjasama pemerintah dalam pengelolaan program Tanjung Enim Kota Wisata

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai peneliti, diharapkan ada keuntungan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini, antara lain:

- 1) Manfaat Teoritis. Untuk penelitian ini, diharapkan bahwa hasilnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pengelola Program Tanjung Enim Kota Wisata dan terutama bagi pembaca untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman mereka. Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat sebagai referensi berharga bagi para akademisi di masa depan untuk mengeksplorasi isu-isu serupa.
- 2) Manfaat Praktis. Studi ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis untuk lebih mengkonsentrasikan upaya menyelenggarakan Tanjung Enim Kota Wisata dengan memanfaatkan strategi *collaborative governance* yang melibatkan tiga pihak, yakni pemerintah, sektor privat, dan masyarakat.
- 3) Manfaat Akademis. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi intelektual yang signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, M., Zitri, I., dan Darmansyah, D. 2022. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Menangani Covid-19 di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2021. Seminar Nasional Lppm 1:61-68.
- Aji, J. S., Widayat, R. M., & Jaelani, G. D. R. 2022. Waste Management Implementation: A Case Study of Bintang Sejahtera Waste Bank at Tanak Awu Village, Central Lombok, Indonesia. In MALAPY 2022: Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, MALAPY 2022, 28 May 2022, Tegal, Indonesia (p. 197). European Alliance for Innovation
- Alwi Hasan, dkk. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Ansell, C. dan Alinson G. 2007. Collaborative governance In Theory And Practive. Journal Of Public Administration. University of California berkeley.
- Arikunto, Suharsimi. 2001. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. : Rineka Cipta.
- DeSeve, G, E. 2009. “Integration and innovation” in the intelligence community: The role of a netcentric environment, managed networks, and social networks”. In Goldsmith, S., & Kettl, D. F. (Eds.), Unlocking the power of networks; keys to high-performance government (pp. 121-144). Ash Center: Brookings Institution Press.
- Dewi, R. T. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengembangan industri kecil (studi kasus tentang kerajinan reyog dan pertunjukan reyog di kabupaten ponorogo) Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Doberstein, C. 2015. Designing collaborative governnace decision-making in search of a ‘collaborative advantage’. Public Management Review, 18(6), 819-841.
- Doberstein, C. 2016. Designing Collaborative Governance Decision-Making in Search of a ‘Collaborative Advantage.’ Public Management Review, 18(6), 819–841. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1045019>

- Dwiyanto, A. 2013. Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hF9nDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mengembalikan+Kepercayaan+Publik+Melalui+Reformasi+Birokrasi.+Jakarta&ots=yT1oC2YNcb&sig=ECXCVnahv3UqU4ALSfyrC2DvpsA>
- Fukuyama, F. 2013. What is governance?. CGD Working Paper 314. Washington, DC: Center for Global Development
- Huxham Chris and Siv Vangen.1996. Nurturing Collaborative Relations Building Trust in Interorganizational CollaborationT, *The Journal of Applied Behavioral Science*, Vol.39 No 1.
- Jann, W., & Wegrich, K. 2007. Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 43- 62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Lasker, R.D., dkk. 2001. Partnership Synergy : A Practical Framework For Studying And Strengthening The Collaborative Advantage. *Milbank Quarterly*, 79(2), 179-205.
- Mills, R. W., & Koliba, C. J. 2015. The challenge of accountability in complex regulatory networks: The case of the deepwater horizon oil spill. *Regulation and Governance*, 9(1), 77-91.
- Moleong, Lexy J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung
- Morse, R. S., & Stephen, J. B. 2012. Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning. *Journal of Public Affairs Education*, 18(3), 565–583
- Murphy, M., Daniel, A., & Joan, M. B. 2015. Value creation in cross-sector collaboration: The roles of experience and alignment. *Journal of Business Ethics*, 130(1), 145-162
- Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H., & Knops, A. 2004. Public participation and collaborative governance. *Journal Social Politic*, 33(2), 203-223.
- Piatak, J., Romzek, B., LeRoux, K., & Johnston, J. 2017. Managing goal conflict in

- public service delivery networks: Does accountability move up and down, or side to side? *Public Performance and Management Review*, 41(1), 1-25.
- Purdy, J. M. 2012. A Framework for Assessing Power in Collaborative Governance Processes. *Public Administration Review*, 72, 409-417
- Raco, J. 2018. Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Pertama . Pustaka Ramadhan, Bandung, Bandung, Indonesia. ISBN 979.604.304.1
- Sudarmo. 201). “Isu-isu administrasi publik dalam perspektif governance”. Surakarta: Smart Media.
- Sugiyono, 2012. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Suwantoro Gamal, 1997. Dasar dasar pariwisata. Penerbit Andi Yogyakarta
- Thompson, R. A., & Meyer, S. 2007. Socialization of Emotion Regulation in the Family. In J. J. Gross (Ed.), *Handbook of emotion regulation* (pp. 249–268). The Guilford Press
- Widayat, R. M., & Kusuma, L. S. T. 2018. Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengatasi Konflik Di Desa Mertak Tombok Dan Desa Bunut Baoq Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. *Ganec Swara*, 12(1), 11-16.
- Widayat, R. M., Nurmandi, A., Rosilawati, Y., Nashir, H., Usman, S., & Baharuddin, T. 2021. MANDALIKA CIRCUIT TRENDING TOPIC ON TWITTER AHEAD OF WORLD SUPERBIKE AND MOTOGP; TOURISM PROMOTION IN THE NEW NORMAL ERA. In *International Conference on Global Optimization and Its Applications 2021* (Vol. 1, No. 1, pp. 75-75).
- Widayat, R. M., Nurmandi, A., Rosilawati, Y., Qodir, Z., Usman, S., & Baharuddin, T. 2022. 2019 Election Campaign Model in Indonesia Using Social Media. *Webology*, 19(1), 5216-5235.
- Zitri, I. 2022. Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(1), 85-102.
- Zitri, I., Lestanata, Y., & Pratama, I. N. 2020. Strategi Pemerintah Desa dalam

Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)(Studi Kasus Pulau Kenawa di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat). Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan.